

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMUTUSKAN EKSEPSI PADA PUTUSAN AKHIR SENGKETA PERTANAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.BL)

**Oleh
Audinda Veronica**

Pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, hal tersebut dilakukan demi menjamin sertipikat menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah. Manfaat diterbitkannya sertipikat yaitu untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah namun perlu dipahami sertipikat dapat saja digugat apabila pemilik bidang tanah tidak merawat serta menjaga batas tanah. Dalam putusan Nomor:10/G/2023/Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung, Ny. Izlifa selaku Penggugat telah lalai dalam mempertahankan hak atas objek tanahnya kemudian gugatan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan dikabulkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus eksepsi pada putusan akhir perkara PTUN. BL Nomor: 10/G/2023/PTUN.BL? (2) Apa akibat hukum dari putusan Perkara PTUN Bandar Lampung Nomor: 10/G/2023/PTUN.BL terhadap Penggugat?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan dari bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Kemudian terdapat metode yuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian lapangan kemudian dari hasil penelitian akan dikorelasikan dengan asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 bahwa pengujian keabsahan Sertipikat hak atas tanah oleh PTUN dalam hal terdapat sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih hakim dapat membatalkan sertipikat yang terbit dengan syarat menyelesaikan masalah keperdataan dahulu pada Pengadilan Umum. (2) Akibat hukum yang diterima oleh para pihak yaitu menyelesaikan proses keperdataan terlebih dahulu pada PU mengenai sengketa kepemilikan, setelah itu perkara baru dapat diproses oleh PTUN terkait prosedur penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang dilakukan oleh BPN.

Kata Kunci: Kompetensi, Pertanahan, PTUN

ABSTRACT

ANALYSIS CONSIDERATION JUDGE'S STATE ADMINISTRATIVE COURT IN THE DECIDE EXCLUSION AT VERDICT END DISPUTE LAND (Case Study Decision Number: 10/G/2023/PTUN.BL)

**By
Audinda Veronica**

Land ownership by the community must be based on proof of legal ownership, but in addition to that, as a land owner, it is necessary to maintain and maintain land boundaries so that there is no overlap (Overlapping) rights own above soil, good for Land status as well as their ownership. District Court have absolute competence to adjudicate civil disputes while Administrative Court have absolute competence to complete administration defect. The problem in this study is what the judge's considered in deciding the exception in the final decision of the Bandar Lampung Administrative Court case Number: 10/G/2023/PTUN.BL and what are the legal consequences of the decision of the Bandar Lampung State Administrative Court Case Number: 10/G/2023/PTUN.BL against Plaintiff.

This study uses a normative juridical research method through the approach of applicable laws and regulations and literature studies from secondary materials in the form of books, journals, and other legal materials. Then there is an empirical juridical method that is carried out through field research and then the results of the research will be correlated with the principles and applicable laws and regulations.

The results of the study show that based on the consideration of the Panel of Judges of the Administrative Court case Number: 10/G/2023/PTUN-BL is an ownership dispute which then becomes the competence of the District Court to adjudicate because this case is oriented towards the acquisition of land ownership rights and subsequently the validity of the title certificate issued by National Land Agency at the Administrative Court can be examined if there is an administration defect in the issuance of the land certificate.

Keywords: Competence, Land, Administrative Court